

## **STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI PESANTREN DAN PENGUATAN DAYA SAING INDUSTRI HALAL DALAM UPAYA PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA**

**Edy Imam Supeno**

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

[Iqoizzaayleennasywa@gmail.com](mailto:Iqoizzaayleennasywa@gmail.com)

**Abstrak:** Indonesia harus berbenah diri untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompetitif dan berkualitas global. Agar mampu bertahan dan dapat memanfaatkan peluang yang ada, maka pemberdayaan ekonomi pesantren harus meningkatkan daya saing industri halal untuk meningkatkan daya saing tersebut maka harus memiliki jiwa kewirausahaan dan jiwa inovasi yang dimiliki harus mampu menjadi motor penggerak untuk meningkatkan daya saing industri halal. Dengan meningkatnya daya saing industri maka pada gilirannya akan mendorong terciptanya daya saing. Untuk dapat mempertahankan eksistensi ekonomi pesantren maka dibutuhkan suatu strategi, salah satunya dengan menciptakan berbagai keunggulan dan kekhasan yang dihasilkan serta perlu dilakukan kolaborasi dengan melibatkan pesantren khususnya dalam hal transfer keahlian bagi para anggota industri, dalam wadah inkubator agar dapat membantu meningkatkan kinerja yang lebih baik, baik dalam pendampingan manajemen dan ketrampilan lainnya. Oleh sebab itu dengan adanya kolaborasi maka akan membawa pengaruh dalam banyak aspek dan berpotensi mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan pekerjaan dan devisa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi struktural bangsa ke arah modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang pembentukan daya saing nasional.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, Ekonomi, Pesantren, Daya, Saing

**Abstract:** Indonesia must be in order to prepare the human resources competitive and global-quality. In order to be able to survive and can take advantage of existing opportunities, then the economic empowerment of the pesantren must increase the competitiveness of the halal industry to increase the competitiveness so that it must have an entrepreneurial spirit and the spirit of innovation owned must Capable of being the driving motor to improve the competitiveness of halal industry. By increasing the competitiveness of the industry, it will in turn encourage competitiveness. To be able to maintain the economic existence of the pesantren then it takes a strategy, one of them by creating a variety of advantages and peculiarities generated and need to be done collaboration by involving Pesantren especially in terms of Transfer of expertise to industry members, in incubator containers in order to help improve better performance, both in mentoring management and other skills. Therefore, with the collaboration, it will bring influence in many aspects and potentially able to provide a large economic contribution through added value, job field and foreign exchange, but also able to make a great contribution in Structural transformation of the nation toward the modernization of people's lives that support the formation of national competitiveness.

**Keywords:** empowerment, economics, Pesantren, competitiveness

## A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang damai dan sekaligus sebagai pandangan hidup (*view of life*) manusia. Seluruh komponen kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari pantauan, perhatian dalam melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Jika setiap materi dan disiplin ilmu disebutkan, maka deretan topik itu akan terus memanjang. Hal tersebut menunjukkan bahwa universalitas Islam berikut ajaran di dalamnya memang tidak ada bandingannya.<sup>1</sup>

Membentuk masyarakat yang kreatif dalam membangun peradaban bukan hal yang gampang apalagi bermodal usaha yang instan. Namun, perlu adanya sebuah media yang benar-benar netral dan dapat diterima oleh masyarakat, apalagi mengingat mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat muslim, sehingga kehadiran pondok pesantren sangatlah tepat untuk membangun karakter masyarakat yang berlandaskan Islam karena pesantren basis utamanya membangun mental, pemikir dan pemberdayaan.

Perkembangan pesantren memiliki peranan yang sangat besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.<sup>2</sup> Institusi pesantren juga memiliki sejarah panjang dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, karena sumber kehidupan pesantren berasal dari hasil-hasil pertanian secara turun-temurun. Pesantren sebagai wadah perjuangan yang didalamnya berdiri lembaga-lembaga diantaranya lembaga sosial, ekonomi dan lembaga dakwah.

Sejarah mencatat pesantren sudah dibangun berawal dari sejarah perdagangan, kemudian berkembang dan merambah pada sektor pendidikan dan dakwah Islam, sedangkan ekonomi, pendidikan dan politik inilah yang menciptakan tradisi dan tatanan masyarakat muslim nusantara.<sup>3</sup> Pendidikan dibangun melalui proses ekonomisasi yang dihasilkan dari usaha-usaha ekonomi kerakyatan yang saat ini disebut ekonomi kreatif. Pesantren tidak akan mengalami kemajuan apabila dari segi prekonomiannya tidak diperbaiki begitu juga dengan lembaga-lembaga yang ada di pesantren tidak akan bertahan lama apabila dari segi ekonominya tidak direformasi atau direkonstruksi ulang, karena pesantren jantung utamanya adalah ekonomi sebagai modal utama.

Peran pesantren menjadi tantangan utama dalam mewujudkan perubahan dan mengentaskan kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi. Kultur pesantren dan masyarakat menjadi pemberdayaan ekonomi dan penguatan industri masyarakat, diakui atau tidak

---

<sup>1</sup>Jauharudin Adien, *Menggerakan Nahdlatut Tujjar*. (Jakarta: Perhimpunan Masyarakat Pesantren Indonesia (PMPI), 2008), 2

<sup>2</sup>Adien, *Menggerakan Nahdlatut...*, 3

<sup>3</sup>Arif Choirul, *Manajemen Pesantren*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 207

hingga saat ini belum ada pesantren yang menjadi pion utama dalam mengentaskan kemiskinan umat Islam pada umumnya. Akan tetapi tidak ada yang mustahil apabila pesantren bersungguh-sungguh untuk menjadi pion utama dalam mengendalikan dan mengentaskan kemiskinan umat Islam pada umumnya dalam pemberdayaan ekonomi dan penguatan industri serta mensejahterakan masyarakat pesantren.<sup>4</sup>

Kemajuan pesantren akan sulit dicapai apabila menggunakan basis tradisional, pesantren memiliki ciri khas, yaitu: pendidikan dan penguasaan. Sedangkan fungsi utama pesantren yaitu; pengkaderan, mencetak SDM dan pemberdayaan masyarakat. Namun, lebih awam ditemukan bahwa masyarakat di pesantren lebih memilih untuk diam dan acuh terhadap modernitas dan isu-isu sosial lainnya, sebagai respon idiom dan paradigma negatif yang dibawa oleh peralihan budaya dan perubahan ideologi masyarakat. Peran kyai atau pengasuh pesantren sangatlah penting dalam menjalankan pesantren, kyai merupakan figur atau sosok yang disegani dan ditakuti karena seluruh perintahnya harus diikuti dan dijalankan, sehingga kemajuan pesantren menjadi stagnan. Atas dasar itu, pesantren harus berperan aktif bahkan menjadi pion utama dalam pemberdayaan ekonomi pesantren dan penguatan daya saing industri halal.

## **B. Pembahasan**

### **Strategi Pemberdayaan Ekonomi**

#### **1. Strategi Pemberdayaan**

Dalam buku *management strategi (strategy)*. Strategi diartikan oleh manajer sebagai rencana skala besar yang berorientasi jangka panjang untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif untuk mencapai tujuan perusahaan. Meskipun rencana tersebut tidak menjabarkan secara akurat dan terperinci mengenai seluruh sumber daya yang akan digunakan pada masa mendatang (termasuk orang-orang, keuangan, dan bahan baku), namun suatu rencana memberikan kerangka kerja bagi keputusan-keputusan manajerial.<sup>5</sup>

Strategi adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Kadang-kadang langkah yang harus dihadapi terjal dan berliku-liku, namun ada juga langkah yang relatif mudah. Di samping itu, banyak rintangan

---

<sup>4</sup>Halim, *Menggali Potensi Ekonomi Pondok Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 243

<sup>5</sup>John A. Pearce II, Richard B. Robinson, Jr., "*Strategic Management Formulation, Implementation and Control*" (*Manajemen Strategis-Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*), Terj. Nia Pramita Sari, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 4

atau cobaan yang dihadapi untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, setiap langkah harus dijalankan secara hati-hati dan terarah.<sup>6</sup>

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Menurut Craig dan Mayo dalam penelitian Nugroho, partisipasi merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Strategi pemberdayaan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai isu pertama pembangunan saat ini.<sup>7</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan ekonomi adalah proses menemukan potensi yang terdapat pada sebuah kelompok masyarakat atau organisasi untuk memaksimalkan potensi yang ada melalui keinginan kuat untuk menjadi mandiri dan lebih baik.

## 2. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata “*daya*” yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan.<sup>8</sup> Sedangkan menurut bahasa Inggris, secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.<sup>9</sup> Pemberdayaan merupakan suatu istilah yang diterjemahkan dari istilah *empowerment* yang merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pemikiran dan kebudayaan masyarakat.<sup>10</sup>

Pemberdayaan pula jika dilihat dari pendekatan kelembagaan dapat dilakukan seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintahan Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1, Ayat 3 menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk

---

<sup>6</sup>Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 171

<sup>7</sup>Trilaksono Nugroho, “*Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*”, (Malang: FIA. Universitas Brawijaya, 2007),

<sup>8</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 242

<sup>9</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 58

<sup>10</sup>Natalia Artha Malau, *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*, Jurnal Ilmiah “*INTEGRITAS*”, (Universitas Negeri Makasar). Vol. 1 No.4, Desember 2015., 1-11

penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Selanjutnya Pasal 4 menyebutkan bahwa pemberdayaan bertujuan sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil dan usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
- b. Meningkatkan peran usaha kecil dalam membentuk produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

Dalam hal inipun masih banyak pengertian pemberdayaan menurut para ahli seperti menurut Zubaedi dalam bukunya menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang demikian dan berupaya untuk mengembangkan potensi ini menjadi tindakan daya.<sup>11</sup>

Pemberdayaan memiliki dua kecenderungan yaitu kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder. Kecenderungan primer merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Kecenderungan sekunder, merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses *menstimulasi*, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan mereka.<sup>12</sup>

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam; memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Zubaedi, *Wacana Pengembangan Alternatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 41-42

<sup>12</sup>Malau, *Strategi Pemberdayaan...*, 11

<sup>13</sup>Suharto, *Membangun Masyarakat...*, 58

Menurut Sumodiningrat, berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu:

- a. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*).
- b. Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*).
- c. Memberikan perlindungan (*Protecting*).

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan.<sup>14</sup>

Selanjutnya, pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.<sup>15</sup>

Program-program masyarakat yang disiapkan harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Perencanaan-perencanaan yang menyusun program-program pembangunan atau industri-industri yang membangun kegiatan usahanya di suatu daerah harus melakukan analisis kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan analisis kebutuhan masyarakat harus benar-benar dapat memenuhi kebutuhan (*need analisis*) dan bukan sekedar membuat daftar keinginan (*list of wants*) yang bersifat sesaat. Analisis kebutuhan harus dilakukan secara cermat agar dapat menggali kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat banyak, bukan merupakan keinginan beberapa orang saja, apakah tokoh masyarakat, atau kepala desa yang mempunyai kewenangan menentukan keputusan. Dalam pembangunan masyarakat (*community development*) mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki (*participating and belonging together*) terhadap program yang dilaksanakan dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat.<sup>16</sup>

### 3. Pengukuran Keberdayaan

---

<sup>14</sup>Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sosial*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 133-134

<sup>15</sup>Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), 263-264

<sup>16</sup>Zamhariri, *Pengembangan Masyarakat: Perspektif Pemberdayaan dan Pembangunan*, Vol. 4, Nomor 1. Juni 2008.

Menurut Sarah Cook dan Steve Macaulay pengukuran keberdayaan ekonomi masyarakat, dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kerangka ACTORS (*authority, confidence and competence, trust, opportunity, responsibility, support*).

- a. *Authority* yaitu kelompok / masyarakat diberikan kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi sesuatu milik mereka sendiri.
- b. *Confidence and competence* yaitu menimbulkan rasa percaya diri dan menyadari kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan.
- c. *Trust* yaitu menimbulkan keyakinan bahwa mereka memperoleh kepercayaan untuk merubah sehingga dapat termotivasi secara maksimal.
- d. *Opportunity* yaitu memberikan peluang kepada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginan sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai potensi.
- e. *Responsibility* yaitu ketika melakukan proses perubahan harus melalui pengelolaan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk berubah menjadi lebih baik.
- f. *Support* yaitu perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadi lebih baik.<sup>17</sup>

#### 4. Peran Pesantren dalam Pemberdayaan

Sejak berdiri pada abad ke-14 Masehi, pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga dakwah, lembaga pendidikan dan pengkaderan ulama serta pusat perjuangan ummat dalam melawan penjajah, maka pada tahun 1980-an, melalui Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dunia pesantren memperoleh tambahan fungsi baru, yaitu sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Maka banyak pesantren yang dijadikan sebagai uji coba untuk program pemberdayaan masyarakat. Kita kenal beberapa pesantren, misal Pesantren Darul Falah Bogor, Pesantren Pabelan Magelang, Pesantren Kajen Pati, Pesantren Langitan Tuban, Pesantren An-Nuqayah Madura dan sebagainya yang dijadikan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Hiruk pikuk pemberdayaan masyarakat kemudian menjadi luar biasa di dunia pesantren.

Kemudian di era 2000-an, pesantren memperoleh tambahan fungsi baru lagi yaitu sebagai pusat pengembangan ekonomi kerakyatan. Maka muncullah pesantren dengan ciri khasnya mengembangkan koperasi, seperti Pesantren Sidogiri. Hal ini menandai bahwa dunia pesantren sesungguhnya tidak sepi dari inovasi yang terus menerus dilakukan. Dan hal ini juga menandakan bahwa dunia pesantren memiliki respon yang sangat tinggi terhadap perubahan zaman. Jadi, sesungguhnya pesantren adalah lembaga sosial dan pendidikan yang dapat menjadi pilar pemberdayaan masyarakat. Secara

---

<sup>17</sup>Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, (Yogyakarta: Gema Insani, 2009), 35-36

garis besar, peran strategis pondok pesantren dalam ekonomi syariah ada dua; **Pertama**, peran pengembangan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah ke masyarakat. Hal ini karena pesantren diakui sebagai lembaga pengkaderan ulama dan da'i yang *legitimized* di masyarakat. Ulama produk pesantren sangat berpotensi menjadi ulama ekonomi Islam yang sangat diperlukan sebagai Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berfungsi mengawasi dan menjaga aktivitas dan program LKS tersebut sesuai dengan syariah. Disamping itu mereka juga dapat berperan sebagai corong sosialisasi ekonomi syariah di masyarakat, karena mereka adalah panutan dan suara mereka lebih didengar dari pada ulama dan da'i produk lembaga non pesantren. Kelebihan lainnya, mereka lebih menguasai fiqh muamalah, sehingga memiliki kemampuan untuk menjelaskan ekonomi syariah kepada masyarakat dengan lebih baik.

**Kedua**, peran mewujudkan laboratorium praktek riil teori ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi. Peran ini juga sangat strategis, mengingat masyarakat melihat pesantren sebagai contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari. Jika pesantren mengembangkan potensinya dalam ekonomi syariah dan berhasil tentu hal itu akan diikuti masyarakat. InsyaAllah mereka ramai-ramai melakukan migrasi dari sistem ekonomi kapitalis menuju ekonomi yang terbebas dari riba, maysir, gharar, riswah, dhalim, jual beli barang haram dan berbagai bentuk kemaksiatan lainnya. Sebaliknya, jika pesantren pasif dan apatis tentu berpengaruh kepada masyarakat, apalagi jika mereka masih berinteraksi dengan ekonomi konvensional.<sup>18</sup>

Pemberdayaan yang dilakukan oleh pesantren terhadap santrinya yaitu pemberdayaan melalui peningkatan kompetensi ekonomi para santri agar nantinya para santri tersebut setelah berada kembali di lingkungan masyarakatnya dapat menjadi panutan baik dalam bidang ekonomi produktif atau sebagai kader-kader pemberdaya ekonomi, di samping peran utamanya sebagai ustadz/ustadzah yang mempunyai kemampuan dalam bidang ilmu agama Islam. Usaha pemberdayaan masyarakat tersebut, bukan hanya tugas dan kewajiban pemerintah semata. Akan tetapi juga menjadi tanggung jawab bagi institusi-institusi atau organisasi lokal (pondok pesantren) yang ada di masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa secara mendasar dan substantif, organisasi lokal memiliki kegiatan internal dan eksternal. Kegiatan internal

---

<sup>18</sup>Hamdan Rasyid, Jurnal: *Peran Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Islam*, 5. (Sumber: <http://www.syariah.feb.unair.ac.id/wp-content/uploads/Peran-Pesantren-dalam-Pengembangan-Ekonomi-Islam-pdf>.diakses Kamis, 29 Agustus 2019, Jam 11:18



berupa konsolidasi dan koordinasi ke dalam dengan membangun solidaritas dan komitmen. Sedang kegiatan eksternal berupa usaha-usaha pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>19</sup>

Pesantren juga terkenal mampu memainkan peran dalam pembangunan. Menurut Afan Gaffar sebagaimana dikutip Sulthon Masyhud dan Khusnurdilo, terdapat tiga jenis peranan yang dapat dimainkan oleh pesantren, yaitu :

- a. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat “*grass roots*” yang sangat esensial dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Meningkatkan politik secara meluas, melalui jaringan, kerjasama, baik dalam suatu negara maupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya.
- c. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.<sup>20</sup>

#### 5. Tahap-tahap dalam Pemberdayaan

Proses pemberdayaan pada intinya adalah ditujukan guna membantu klien yang memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan kemampuan diri mereka, termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan kegiatan.<sup>21</sup> Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya masyarakat miliki antara lain, melalui daya dari lingkungannya sendiri. Adapun tiga tahapan dalam pemberdayaan yaitu:

##### a. Pemberdayaan pada mitra ruhaniyah

Degradasi moral atas pergeseran nilai masyarakat Islam saat ini sangat mengguncang masyarakat Islam. Kepribadian kaum muslimin terurama generasi muda begitu gampang terbawa arus kebudayaan negatif barat, hal ini juga diperparah dengan gagalnya pendidikan agama. Untuk keluar dari masalah ini masyarakat Islam harus berjuang keras mendisain kurikulum yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniyah Islamiyah yang tidak bertentangan dengan perjuangan kebenaran ilmiah dan kemodernan.

##### b. Pemberdayaan intelektual

Umat Islam yang berada di Indonesia bahkan dimanapun sudah jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan teknologi. Untuk itu diperukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai perjuangan besar.

---

<sup>19</sup>Ziemek Manfred, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta; P3M, 1986), 211

<sup>20</sup>Sulthon Masyhud, Khusnurdilo, *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), 13

<sup>21</sup>Isbandi Rukmiyato, *Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas Pengantar Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2001), 32

### c. Pemberdayaan ekonomi

Masalah kemiskinan menjadi demikian identik dengan masyarakat Islam. Dan pemecahannya merupakan tanggungjawab umat Islam sendiri. Situasi ekonomi masyarakat Islam Indonesia bukan untuk diratapi melainkan untuk dicari jalan keluarnya. Untuk keluar dari himpitan ekonomi ini diperlukan perjuangan besar dan gigih dari setiap komponen umat, bahwa seorang manusia harus mampu menguasai *life skill* atau keahlian hidup.<sup>22</sup>

## **Peran Pesantren Terhadap Pemberdayaan Ekonomi**

### 1. Perkembangan Ekonomi Pesantren

Sebagaimana seperti disebutkan dalam sejarah, pesantren merupakan sebuah institusi kelembagaan keagamaan yang syarat nilai dan tradisi luhur dimana telah menjadi karakteristik pesantren pada hampir seluruh perjalanannya. Secara potensial, karakteristik pesantren tersebut memiliki peluang untuk dijadikan sebagai dasar pijakan dalam rangka menyikapi persoalan-persoalan lain yang menghadang pesantren pada khususnya dan masalah-masalah umat pada umumnya termasuk ekonomi.<sup>23</sup>

Biasanya, dalam pesantren modern diterapkan adanya sistem berdikari terutama dalam hal ekonomi. Dikarenakan kemandirian ekonomi dapat memajukan pesantren dan memperkuat eksistensi pesantren, tanpa meninggalkan sistem yang lama. Sehingga akan tercipta pondok pesantren yang maju dan dapat memberdayakan santri serta ekonomi masyarakat di sekitar pesantren.

### 2. Pemberdayaan Ekonomi

Sebagaimana diketahui, kegagalan perekonomian pesantren ialah dikarenakan adanya kebijakan pemerintah mengenai sistem ekonomi konglomerasi. Dalam kenyataannya, sistem konglomerasi tersebut hanya menguntungkan satu pihak saja, yaitu kelompok yang telah memiliki kemampuan dan akses ekonomi. Sementara itu, masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dan akses ekonomi, tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang menguntungkan kegiatan usahannya.<sup>24</sup>

Pondok pesantren pada kenyataannya adalah lembaga potensial untuk bergerak ke arah ekonomi berbasis rakyat (umat). Jika pondok pesantren hanya menjadi penonton di

---

<sup>22</sup>Nanih Mahendrawati dan Agus Ahmad Syafe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Cet. Ke- I, (Bandung: Rosa Karya, 2001), 25

<sup>23</sup>Tirta Rahayu Ningsih, *Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengembangan Sumber Daya Lokal (Studi pada Pondok Pesantren Daarut Tauhid)*, (Jawa Barat: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), 71

<sup>24</sup>Nur Syam, *Penguatan Kelembaga Ekonomi Berbasis Pesantren*, Dalam A. Halim *et al.* *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 248

era yang akan datang, maka lembaga-lembaga ekonomi mikro lain yang justru akan lari dan menggesernya untuk mengarah pada kemajuan. Oleh karena itu, diperlukan adanya analisis yang cermat dalam melakukan penguatan kelembagaan ekonomi ini, agar tidak salah melangkah. Sebenarnya, sasaran akhir dari pemberdayaan ekonomi pondok pesantren adalah kemandirian dari pesantren.

### 3. Nilai dan Jiwa kepondok pesantrenan

Penanaman nilai merupakan kunci dari setiap langkah yang akan ditempuh oleh pondok pesantren untuk melakukan suatu kegiatan apapun. Termasuk pemberdayaan ekonomi. Setiap pesantren harus memahami dengan baik karakter sepiritual dan keilmuan apa yang tepat bagi kelangsungan kehidupan pondok pesantren itu sendiri. Para *Kyai* ataupun pemimpin pondok pesantren akan berpengaruh pada titik ini. Para "*pembesar*" pondok pesantren harus mulai merumuskan landasan yang akan menjadi acuan di semua kegiatan pondok pesantren yang dipimpinnya. Nilai-nilai tersebutlah yang akan membawa keberhasilan sesuai yang dicita-citakan.<sup>25</sup>

Nilai-nilai asasi tersebut kemudian harus dipegang teguh untuk mengembangkan sistem pemberdayaan yang telah dirumuskan oleh pondok pesantren, agar nantinya dalam perjalanannya dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dapat menggempur usaha-usaha yang telah dilakukan. Sehingga pondok pesantren sesuai yang dicita-citakan menjadi pusat kelembagaan ekonomi umat.

### 4. Wakaf

Saat ini, kebanyakan pesantren di Indonesia berjalan dibawah naungan satu otoritas tunggal. *Kyai* sebagai pusat kehidupan pondok pesantren memegang semua peran dalam memutuskan harus seperti apa pondok yang dipimpinnya. Sebagai manusia, *Kyai* juga berpotensi untuk melakukan kekeliruan. Namun, dengan otoritas yang mutlak, kebijakan-kebijakan seorang *Kyai* terhadap pesantrennya hampir tidak mungkin dibantah. Ini menghalangi independensi pesantren untuk mengarahkan santrinya menjadi kader umat yang sesuai dengan relaita kekinian.

Selain itu, peng-kultusan seorang individu juga tidak berdampak baik bagi pondok pesantren tersebut. Banyak dari pondok pesantren di Indonesia yang mati karena *Kyai* pimpinan pondok pesantren tersebut meninggal dunia. Pesantren kehilangan figur yang membuat pondok pesantren kehilangan sosok yang sering

---

<sup>25</sup>Ningsih, *Pemberdayaan Ekonomi...*, 72

diartikan bahwa pondok tersebut tidak mungkin berjalan lagi. Masalah ini sebenarnya dapat ditanggulangi dengan wakaf.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam, wakaf akan menjadi kunci awal eksistensi pondok pesantren.<sup>26</sup> Di bawah badan wakaf, pondok pesantren akan terhindar dari otoritas mutlak dibawah satu pihak, serta juga kan meninggalkan peng-kultusan individu yang berlebihan, *Kyai* misalnnnya menjalankan seluruh kehidupan di pondok pesantren. Seluruh keputusan dan kebijakan yang menyangkut kehidupan pondok pesantren akan ditentukan melalui musyawarah, bukan keputusan sepihak. Dengan begitu, asas demokrasi, *ukhuwah* dan independensi akan berjalan dengan baik.

##### 5. Pemberdayaan Sumber Daya Lokal

Pesantren merupakan institusi budaya yang lahir atas prakarsa dan insiatif tokoh masyarakat yang bersifat otonom. Sejak awal berdirinnya, merupakan potensi strategis yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Terutama dalam hal ekonomi. Dengan didiami puluhan bahkan ratusan santri yang bermukim, menjadi jalan tersendiri bagi pondok pesantren untuk memberdayakan ekonominya. Ratusan bahkan ribuan santri tersebut, dapat dijadikan sebagai konsumen positif.<sup>27</sup> Selain itu, pesantren juga didukung oleh masyarakat disekelilingnya, yang pada dasarnya adalah konsumen yang kebutuhannya dapat dicukupi secara ekonomis oleh pesantren. Jadi, pesantren, pada hakikatnya mampu menjadi pusat kelembagaan ekonomi bagi warganya di dalam pesantren maupun diluar pesantren.

Dengan melihat kenyataan tersebut, maka pesantren haruslah menggerakan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki pesantren, agar nantinya mampu meningkatkan laju pertumbuhan pesantren terutama dalam hal ekonomi. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, pesantren diyakini mampu untuk mewujudkan hakikat bahwa pesantren mampu menjadi pusat kelembagaan ekonomi.

Memfaatkan sumberdaya lokal salah satunya, memanfaatkan santri dengan sejuta potensi yang dimiliki pesantren sebagai penggerak ekonomi. Oleh sebab itu, di dalam pondok pesantren sebaiknya diadakan penelurusan bakat atau potensi santri lalu dibina dan dilatih. Selain santri di dalam pondok pesantren dibekali dengan spiritualitas, sebagai bekal mengabdikan dirinya pada umat, santri juga harus belajar bagaimana manajemen suatu organisasi, maupun bekal kewirausahaan. Agar

---

<sup>26</sup>Ningsih, *Pemberdayaan Ekonomi...*, 72

<sup>27</sup>*Ibid.*, 73

nantinnya, melalui sumber daya yang dimiliki santri akan mampu memaksimalkan potensi ekonomi pondok pesantren serta mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.

#### 6. Pemberdayaan Ekonomi Mandiri

Sebagaimana yang telah diterapkan oleh pondok pesantren yang menganut sistem modern, kemandirian akan menjadikan pondok pesantren mampu berdiri tanpa bergantung pada pihak manapun.<sup>28</sup> Artinya, dalam pengembangan pondok pesantren, khususnya *khizanattullah* atau pengadaan sumber pembiayaan mandiri, pondok pesantren dapat memperdayakan seluruh civitas pondok untuk menjalankan roda ekonomi, sistem pendidikan, hingga perluasan jaringan tanpa intervensi pihak manapun.

Pondok pesantren harus mulai membangun badan-badan usaha mandiri untuk dikelola secara mandiri pula oleh santri dan guru, dengan naungan jiwa keihlasan, kesalihan dan pengabdian atas pondok pesantren. Dengan begitu, pondok tidak akan kekurangan sumber penghidupan untuk menjalankan lembaganya melalui memberdayakan semua civitasnya.

Salah satu contoh yaitu dengan pendirian KOPOTREN (Koperasi Pondok Pesantren). Dengan adanya hubungan interaksionis-kultural antara pesantren dengan masyarakat menjadikan kemudahan tersendiri bagi adanya pendirian koperasi di suatu pesantren. Melalui hubungan tersebut, pesantren mampu mengoptimalkan masyarakat sebagai konsumennya. Sehingga, selain mengoptimalkan santri sebagai konsumen pondok pesantren juga mampu mengembangkan usahannya dan mampu memiliki jaringan yang luas.

#### **Kerjasama Intensif Pemrintah dengan Keuangan Syariah dan Pesantren**

Penguatan daya saing industri harus selalu bekerjasama dan bermitra dengan Keuangan Syariah dalam menjalankannya. Ketiga unsur lembaga ini diharapkan bisa bekerjasama dan bergandengan dengan baik dalam setiap aktifitas maupun dalam kebijakan.<sup>29</sup> Oleh sebab itu, dengan adanya kesinergisan antara tiga unsur lembaga tersebut perekonomian di Jawa Timur pada khususnya dan pada umumnya di Indonesia diharapkan mampu bertahan dalam menghadapi gejala maupun goncangan krisis serta bisa melibatkan partisipasi seluruh masyarakat terutama dalam hal pengembangan dan pembiayaan industri. Tanpa adanya sebuah ikatan kerjasama yang baik pasti tidak akan

---

<sup>28</sup>Ningsih, *Pemberdayaan Ekonomi...*, 74

<sup>29</sup>Dwi Iriyani, *Penguatan dan Peningkatan Daya Saing pada UMKM Sebagai Strategi Menghadapi Mea*, (Surabaya: FMIPA-UT di UPBJJ, 2015), 8

mampu dalam mengelola sumber daya negara dengan baik oleh karena itu demi terciptanya kemakmuran di bidang ekonomi dan di bidang lainnya. Kerjasama yang diperbolehkan dan benar sesuai dengan kaidah yang ada. Untuk meningkatkan kerjasama yang bersinambungan dengan lembaga keuangan syariah dalam pembangunan di bidang ekonomi supaya tidak tertinggal dengan negara-negara lain. Sesuatu yang besar pasti dimulai dari yang kecil kemudian menjadi besar dan tanpa adanya lembaga-lembaga besar yang mendukung dalam mengelola sumberdaya alam tidak akan dapat terwujud.

Nilai industri halal global diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,4 triliun pada tahun 2019. Kombinasi faktor permintaan dan suplai yang saling melengkapi dalam mewujudkan ekspansi industri halal harus salim bersinambungan anantara satu sama lain. Industri halal meliputi berbagai sector, seperti makanan halal, pakaian, keuangan, dan pariwisata. Letak wilayah pasar halal sangat meluas tidak hanya di Negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), tetapi hingga Inggris, Brasil, Amerika Serikat dan Thailand.

Kondisi keuangan syariah seharusnya mampu memanfaatkan situasi dalam mengurangi defisit transaksi secara menyeluruh dengan adanya optimalisasi dan dukungan keuangan syariah yang bisa menawarkan pembiayaan modal kerja atau dengan menerbitkan sukuk.

Dalam laporan Malaysia International Financial Center bertajuk *“The Halal Economy Huge Potential For Islamic Finance”*.<sup>30</sup> Baik indutri halal maupun industry keuangan syariah bisa menjalin hubungan saling menguntungkan. Bagi industry halal, pembiayaan berbasis prinsip syariah akan semakin melengkapi sisi operasional perusahaan dan membuka alternative pendanaan baru. Sedangkan bagi industry keuangan syariah, perusahaan industry halal yang terdaftar dalam satu indeks syariah dapat menjadi satu kelas asset investasi alternatif.

Pemerintah berkewajiban untuk melebarkan akases industri terutama sumberdaya alam agar di dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, untuk menciptakan peluan pasar lokal dan global yang diharapkan mampu menyediakan dukungan penguatan dan peningkatan kemampuan industri dalam memperoleh akses teknologi, pasar (non finansial) maupun akses terhadap permodalan.<sup>31</sup> Untuk itu perlu dilakukan kolaborasi dengan melibatkan perguruan tinggi khususnya dalam hal transfer keahlian bagi para

---

<sup>30</sup>Dewi Novitasari, *Indonesia: Sebagai Wajah Industri Halal Dunia Dengan Sokongan Korelasi Antar Lembaga Terkait Yang Saling Bersinergi Dalam Percaturan Ekonomi Asean*, (Jawa Barat: Universitas Gunadarma, 2015), 3

<sup>31</sup>Iriyani, *Penguatan dan Peningkatan...*, 9

anggota industri, dalam wadah *incubator* agar dapat membantu meningkatkan upaya kinerja yang lebih baik, baik dalam pendampingan manajemen dan ketrampilan lainnya. Dengan adanya kolaborasi tersebut akan membawa pengaruh dalam banyak aspek. Keikutsertaan *incubator* industri dalam pameran nasional dan internasional diharapkan membuahkan hasil yang positif.

Regulasi dalam penyusunan dan mengangkat petugas Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJH) yang akan ditetapkan menjadi badan sertifikasi halal merupakan kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjadi badan Independen dan kredibel. BPJH merupakan upaya yang kongkrit dalam melestarikan dan mentertibkan aturan-aturan dalam undang-undang untuk memperkuat posisi penyelenggara industri halal melalui produk undang-undang. Majelis Ulama Indonesia saat ini sudah mendapat mandat untuk menjalankan dan melaksanakan sebagai penyelenggara sertifikasi halal hal ini sudah sesuai dengan peraturan Menteri Agama.<sup>32</sup> Oleh karena itu, pemerintah maupun DPR harus mendukung langkah yang baik yang harus diaplikasikan dalam membuat aturan atau rancangan undang-undang jaminan produk halal tersebut. Dengan adanya kekuatan hukum yang pasti maka pemerintah harus memberikan rasa keadilan terhadap semua lapisan masyarakat Indonesia. Dengan adanya badan independen yang mengurus sertifikasi halal, publik akan mempunyai posisi tawar.

Dengan usaha yang kondusif yang diciptakan oleh pemerintah, maka akan memudahkan masyarakat untuk meningkatkan daya saing, baik daya saing perusahaan maupun daya saing dari apa yang dihasilkan.

### **Meningkatkan Kualitas SDM**

Dalam meningkatkan sumber daya manusia ada beberapa komponen yang harus dilaksanakan yaitu; pengembangan individual, profesional dan bermasyarakat dalam hal ini organisasi dari tiga komponen tersebut merupakan hal wajib yang harus dilakukan.<sup>33</sup> Tujuan dari tiga komponen pengembangan yaitu usaha untuk meningkatkan pandangan dari seorang untuk berdaya saing dalam meniti karir, sedangkan bermasyarakat merupakan aplikasi dari pendapatan atau perolehan setiap individunya. Oleh sebab itu, karakteristik sumberdaya manusia yang dibutuhkan pada saat ini yaitu; 1). Menghasilkan hasil dari pengembangan potensi yang berkualitas sehingga dapat bersinergi dengan negara-negara

---

<sup>32</sup>Novitasari, *Indonesia: Sebagai...*, 4

<sup>33</sup>Iriyani, *Penguatan dan Peningkatan...*, 6

lain. 2). Berpikir kreatif dan inovatif sehingga bisa memunculkan gagasan atau ide-ide yang cemerlang untuk memberikan solusi dalam mengurangi defisit transaksi berjalan.

Dalam pengutan daya saing industri halal ada lima syarat yang harus diutamakan, *pertama*, pendidikan *kedua*, modal *ketiga*, teknologi *keempat*, informasi dan komunikasi *kelima*, input krusial.<sup>34</sup> Oleh sebab itu, lima syarat ini merupakan awal dari sebuah kemajuan dalam menguatkan daya saing. Perubahan pasar akan terjadi tergantung selera konsumen dan pesaingan, pasar akan mengikuti arus tergantung perubahan ekonomi nasional dan ekonomi global maka sebuah teknologi harus diutamakan untuk menentukan daya saing untuk mengetahui apakah ekonomi nasional dan global ada perubahan. Perlu digarisbawahi bahwa pemenuhan kelima prasyarat utama tersebut adalah tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Strategi dalam melaksanakan syarat diatas untuk menjadikan industri yang kompetitif. Maka harus ada perhatian khusus atau difokuskan terhadap peningkatan kemampuan dalam pemasaran dan distribusi.

### **Mendongkrak Pertumbuhan Industri**

Strategi yang ditempuh Kemenperin untuk mencapai target pertumbuhan industri nasional adalah dengan mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam, mengendalikan ekspor bahan mentah dan sumber energi, meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri, mengembangkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI), Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Industri (KI), dan Sentra Industri Kecil dan Menengah, serta menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan menengah.<sup>35</sup>

Untuk mendorong pertumbuhan industri, kata Menperin, pemerintah melalui Kemenperin akan mendorong pertumbuhan populasi industri skala besar-sedang sebanyak 9.000 unit usaha dan 20.000 unit usaha industri kecil. Hal itu dilakukan melalui program hilirisasi hasil tambang ke produk dan jasa industri, hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri, industri barang modal dan industri padat karya serta pembinaan IKM agar dapat terintegrasi dengan industri pemegang merek (OEM).

Masih dalam rangka mendorong pertumbuhan industri di dalam negeri, Menperin Saleh Husin mengatakan, pemerintah akan terus memperluas pemberian insentif fiskal berupa *Tax Holiday*, *Tax Allowance*, dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, 6

<sup>35</sup>Kementerian Perindustrian, *Industrialisasi Menuju Kehidupan Yang Lebih Baik*, Media Industri, Edisi No. 01, 2015, 7



Fasilitas *Tax Holiday* adalah pembebasan PPh badan dalam jangka waktu lima tahun sampai paling lama 10 tahun dan pengurangan PPh badan sebesar 50% dari PPh badan terutang selama dua tahun. Sampai saat ini baru ada tiga perusahaan yang sudah memanfaatkan fasilitas *Tax Holiday*, yaitu PT Unilever Oleochemical Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia, dan PT Energi Sejahtera Mas dengan total investasi sebesar Rp5,5 triliun.<sup>36</sup>

Saat ini terdapat tujuh perusahaan pemohon fasilitas *Tax Holiday* yang masih dalam proses, yaitu PT Indorama Polychem Indonesia, PT Ogan Komerin Ilir Pulp & Paper Mills, PT Caterpillar Indonesia Batam, PT Feni Haltim, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, PT Synthetic Rubber Indonesia dan PT Borneo Alumina Indonesia dengan total nilai investasi sebesar Rp76,3 triliun.

Fasilitas *Tax Allowance* adalah pengurangan pajak penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama enam tahun masing-masing sebesar 5% per tahun, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, pengenaan pajak penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku dan kompensasi kerugian yang lebih lama dari lima tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun.<sup>37</sup>

Hingga saat ini, terdapat 34 perusahaan pemohon *Tax Allowance* di mana 4 (empat) perusahaan di antaranya sudah ditetapkan mendapatkan fasilitas dimaksud dan 28 perusahaan masih dalam proses pembahasan dengan Ditjen Pajak, BKPM, dan kementerian teknis. Sedangkan enam perusahaan lainnya belum dibahas karena baru mengajukan permohonan fasilitas kepada BKPM.

Fasilitas BMDTP adalah pembebasan tarif bea masuk atas importasi barang jadi, barang setengah jadi dan atau bahan baku termasuk suku cadang dan komponen yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan industri dengan kriteria barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas BMDTP.

Barang dimaksud belum diproduksi di dalam negeri, atau sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan atau sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Fasilitas BMDTP pada tahun 2014 sudah diberikan kepada 15 sektor industri dengan jumlah pagu anggaran Rp504,6 miliar. Realisasi sampai tanggal 15 Desember 2014

---

<sup>36</sup>Perindustrian, *Industrialisasi Menuju...*, 7

<sup>37</sup>*Ibid.*, 8

sebesar Rp82,8 miliar (16,4%), sedangkan usulan tahun 2015 untuk 17 sektor industri dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp565,2 miliar.<sup>38</sup>

Sementara itu, untuk meningkatkan daya saing industri nasional, Menperin Saleh Husin juga telah menyiapkan sejumlah strategi yang akan diterapkan selama lima tahun ke depan. Strategi yang dimaksud adalah meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui hilirisasi industri berbasis agro, migas dan bahan tambang mineral, meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas SDM industri, melakukan revitalisasi dan modernisasi permesinan industri, dan mendorong pembangunan infrastruktur pendukung industri.

Strategi lainnya yang akan ditempuh adalah memberikan insentif fiskal berupa *Tax Holiday* dan *Tax Allowance*, menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri antara lain dengan menerapkan bea keluar dan *Domestic Market Obligation* (DMO),<sup>39</sup> memfasilitasi pembangunan kawasan industri dan penyebaran industri ke luar Jawa, serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

### C. Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas. Di Indonesia, capaian pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi sasaran pembangunan dalam dokumen pembangunan seperti RPJP, RPJMN, dan RKP. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah semakin meningkat, namun perlu dikaji kualitas pertumbuhannya. Untuk itu perlu dilakukan kolaborasi dengan melibatkan pesantren khususnya dalam hal transfer keahlian bagi para anggota industri, dalam wadah incubator agar dapat membantu meningkatkan kinerja yang lebih baik, baik dalam pendampingan manajemen dan ketrampilan lainnya. Oleh sebab itu dengan adanya kolaborasi maka akan membawa pengaruh dalam banyak aspek dan berpotensi mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan pekerjaan dan devisa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi struktural bangsa ke arah modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang pembentukan daya saing nasional. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yaitu SDM yang inovatif, kreatif dan kompetitif.

### D. Daftar Pustaka

Adien, Jauharudin, *Menggerakkan Nahdlatut Tujjar*. Jakarta: Perhimpunan Masyarakat Pesantren Indonesia (PMPI), 2008.

---

<sup>38</sup>Perindustrian, *Industrialisasi Menuju...*, 9

<sup>39</sup>*Ibid.*, 9

- Bashith, Abdul, *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, Yogyakarta: Gema Insani, 2009.
- Choirul, Arif, *Manajemen Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Halim, *Menggali Potensi Ekonomi Pondok Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Iriyani, Dwi, *Penguatan dan Peningkatan Daya Saing pada UMKM Sebagai Strategi Menghadapi Mea*, Surabaya: FMIPA-UT di UPBJJ, 2015.
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Mahendrawati, Nanih dan Agus Ahmad Syafe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Cet. Ke- I, Bandung: Rosa Karya, 2001.
- Malau, Natalia Artha, *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*, Jurnal Ilmiah "INTEGRITAS", (Universitas Negeri Makasar). Vol. 1 No.4, Desember 2015.
- Manfred, Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, Jakarta; P3M, 1986.
- Masyhud, Sulthon, Khusnurdilo, *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2005.
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Ningsih, Tirta Rahayu, *Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengembangan Sumber Daya Lokal (Studi pada Pondok Pesantren Daarut Tauhid)*, Jawa Barat: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.
- Novitasari, Dewi, *Indonesia: Sebagai Wajah Industri Halal Dunia Dengan Sokongan Korelasi Antar Lembaga Terkait Yang Saling Bersinergi Dalam Percaturan Ekonomi Asean*, Jawa Barat: Universitas Gunadarma, 2015.
- Nugroho, Trilaksono, "Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah", Malang: FIA. Universitas Brawijaya, 2007.
- Nur Syam, *Penguatan Kelembaga Ekonomi Berbasis Pesantren*, Dalam A. Halim et al. *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Pearce II, John A., Richard B. Robinson, Jr., "Strategic Management Formulation, Implementation and Control" (Manajemen Strategis-Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian), Terj. Nia Pramita Sari, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Perindustrian, Kementerian, *Industrialisasi Menuju Kehidupan Yang Lebih Baik*, Media Industri, Edisi No. 01, 2015.
- Rukmiyato, Isbandi, *Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas Pengantar Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2001.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sosial*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Zamhariri, *Pengembangan Masyarakat: Perspektif Pemberdayaan dan Pembangunan*, Vol. 4, Nomor 1. Juni 2008.
- Zubaedi, *Wacana Pengembangan Alternatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Rasyid, Hamdan, Jurnal: *Peran Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Islam*, 5. (Sumber: <http://www.syariah.feb.unair.ac.id/wp-content/uploads/Peran-Pesantren-dalam-Pengembangan-Ekonomi-Islam-pdf>).diakses Kamis, 29 Agustus 2019.